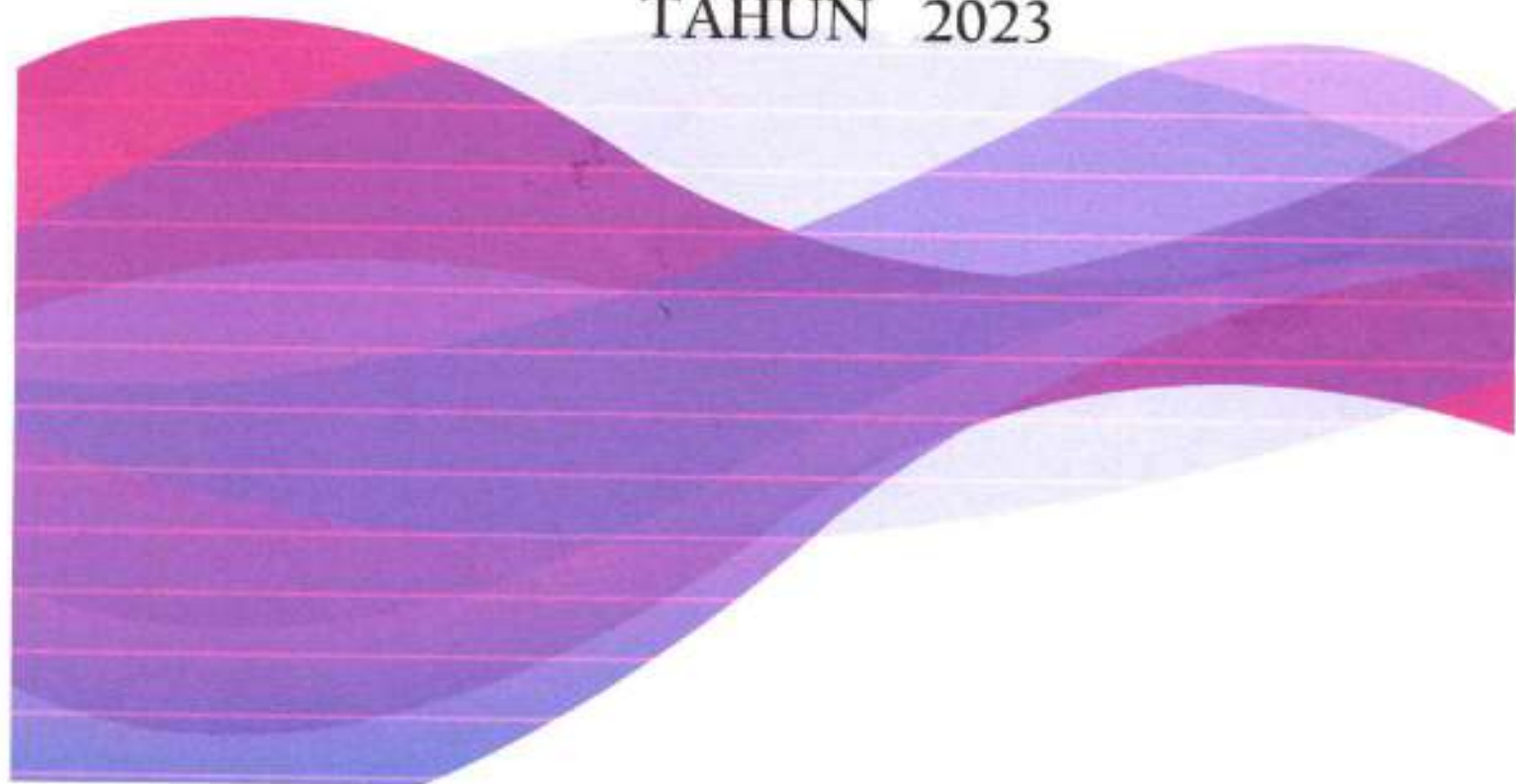


PENJENJANGAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2023



DOKUMEN

PENJENJANGAN KINERJA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk memberikan langkah untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja ini merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan kinerja tahun 2023.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan dokumen penjenjangan dan mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi bahan untuk dijadikan sandaran dalam proses penyusunan perencanaan kinerja dalam penyusunan penyelarasan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih

Sumbawa Besar, 5 Januari 2023


Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa,
AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197008231992111001

DAFTAR ISI

<i>Halaman judul</i>		<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>		<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>		<i>iii</i>
Bab I	Pendahuluan	1
Pendahuluan		
Bab II	Model Logis Pohon Kinerja	5
Pohon Kinerja dan Model Logis		
Bab III	A. Hirarki Sasaran Penjenjangan Kinerja	9
Tahapan	B. Tahapan Penjenjangan Kinerja	9
Penjenjangan Kinerja	C. Penjelasan Penjenjangan Kinerja	10
	D. Prinsip Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja	13
	E. Pohon Kinerja	14
Bab IV	A. Klasifikasi Terhadap Level Kinerja	19
Menuangkan Pohon Kinerja Ke Komponen	B. Penetapan Kinerja Strategis Daerah	26
Perencanaan Dan	C. Penetapan Kinerja Taktikal	26
Kinerja Jabatan	D. Penetapan Kinerja Operasional	27
	E. Penetapan Kinerja Sub Operasional	28
Bab III		
Penutup	Penutup	38

BAB I

PENDAHULUAN

Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah. Beberapa isu strategis terkait penjenjangan dan penyelarasan kinerja instansi pemerintah, antara lain:

- a. Sebagian Indikator pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak dilaporkan instansi pemerintah terkait;
- b. Program/kegiatan belum dapat mengungkit capaian kinerja instansi pemerintah dan kinerja pembangunan *Collaborative Working* dan pengelolaan kinerja yang bersifat lintas sektor tidak terdesain sejak perencanaan;
- c. Capaian kinerja pembangunan instansi pemerintah relatif *stagnan*, bahkan turun, namun Nilai Kinerja Individu (SKP) tinggi; dan
- d. Ukuran kinerja tingkat instansi pemerintah dan unit kerja masih ada yang berorientasi pada proses dan output saja.

Sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, penjenjangan dan penyelarasan kinerja telah menggunakan metode *Cascading* dan *Alignment* mengadopsi system pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. *Cascading* atau Penurunan, yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Sementara itu, Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah sebelumnya menggunakan metode *alignment* atau penyelarasan yaitu sebuah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan upaya mengefektifkan strategi yang telah ditentukan. Implementasi strategi akan lebih efektif apabila seluruh unit/pegawai melakukan penyelarasan SS, IKU dan target dengan strategi organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Pada dasarnya, *cascading* SS dan IKU harus dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di suatu organisasi. Namun, *cascading* dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. Cascading IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit/pegawai sehingga IKU tidak selalu di-*cascade* (diturunkan) hingga level pelaksana.

Pada perkembangannya, sejalan dengan sejumlah isu yang disampaikan di atas sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan dalam bentuk regulasi tersebut ditetapkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, diperlukan tata cara penilaian atau cara menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Penjenjangan Kinerja sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

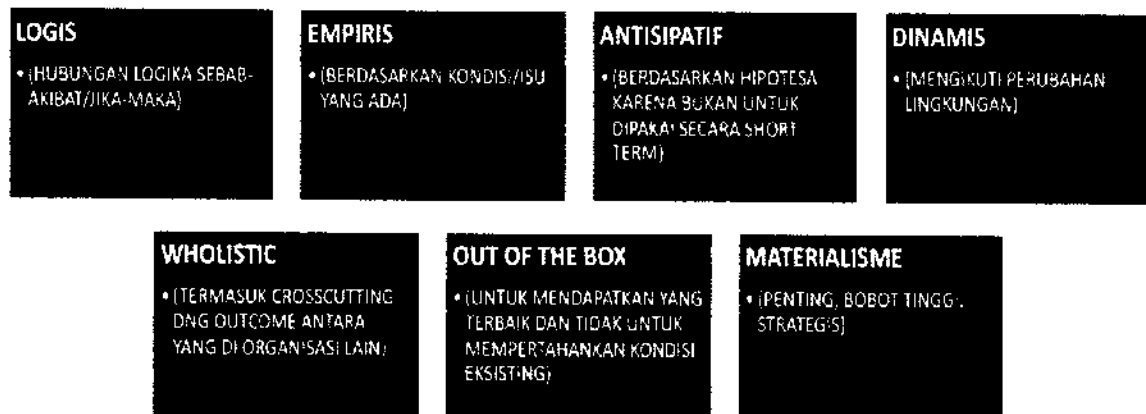
Objek dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah seluruh Instansi Pemerintah, yang mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah Daerah. Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Instansi Pemerintah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi. Tahapan dari Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja; menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor); menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; merumuskan Indikator Kinerja; dan menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Penjenjangan Kinerja dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: untuk mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu Dengan baik; Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu; Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat; Mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dari penjenjangan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah adalah dapat digunakan untuk:

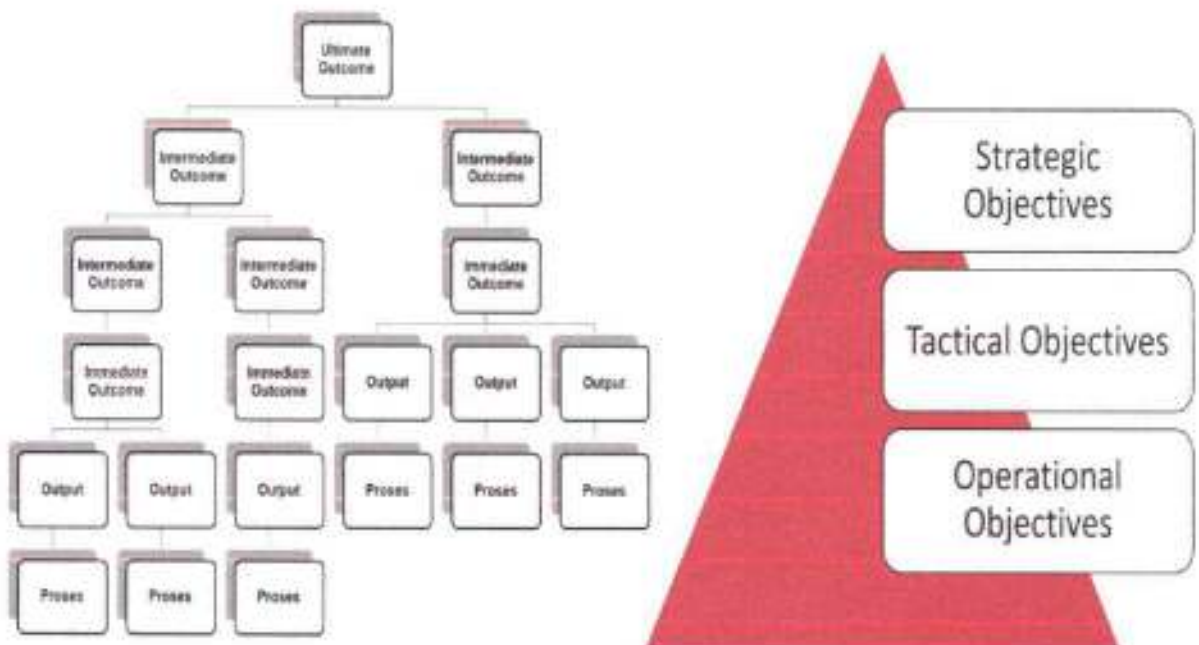
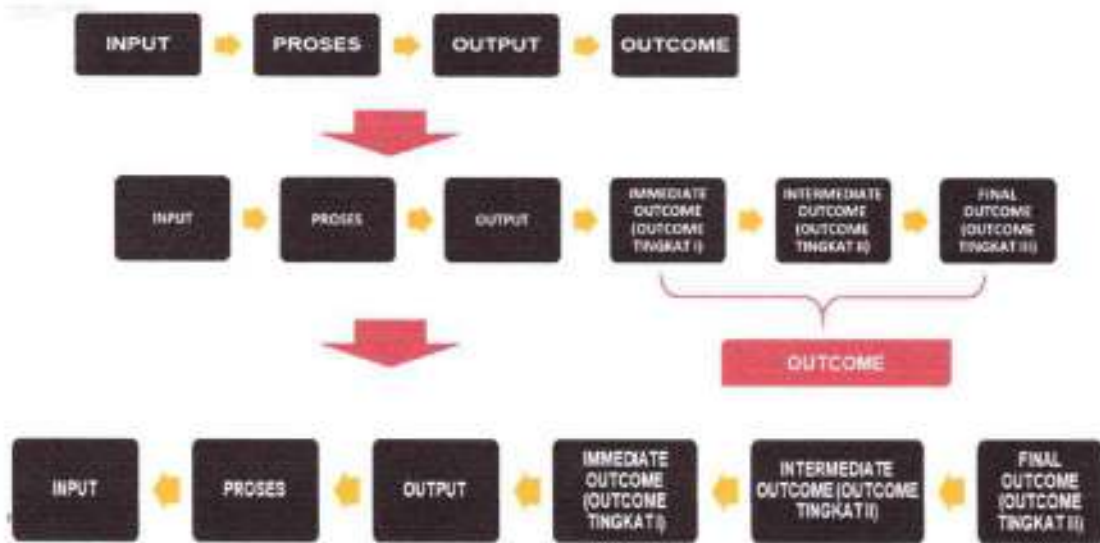
- a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu; penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- b. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat; penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
- c. dan penataan struktur organisasi.

BAB II
POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Penjenjangan Kinerja berkaitan erat dengan penyusunan pohon kinerja yang terdiri atas beberapa model logis. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Pohon Kinerja, antara lain:

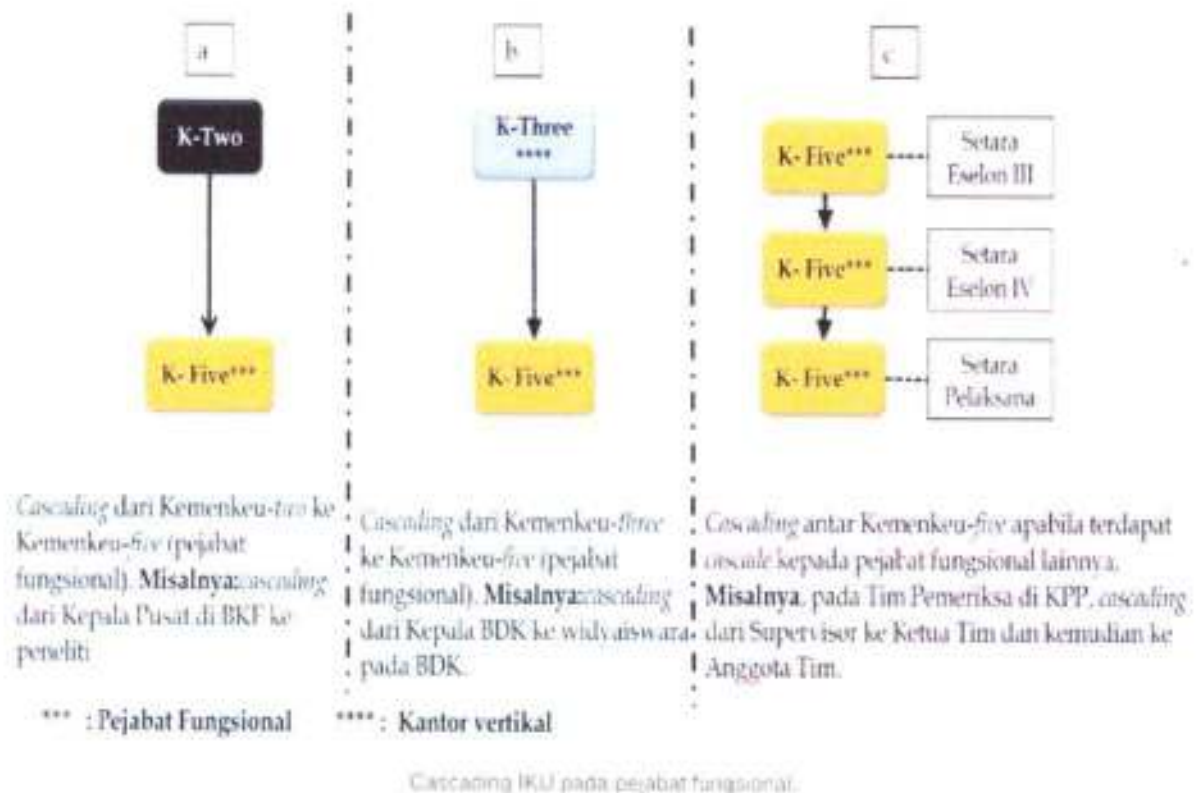


Model logis atau *Logic Model* mutlak diperlukan dalam penyusunan pohon kinerja, karena model logis tersebut akan membantu instansi pemerintah dalam menjenjangkan kinerja organisasi sehingga akan mendapatkan kinerja yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi. Model Logis yang rekomendasikan, sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar: Model Logis dalam Penjenjangan Kinerja

Memperhatikan Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, *Cascading* pada pejabat fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan metode sebagaimana pada gambar berikut:



Penjelasan:

- Pejabat fungsional yang tidak perlu melakukan cascade kepada pejabat fungsional lainnya, sehingga cascading dapat dilakukan dengan mekanisme kolom a dan b pada gambar di bawah, dengan ketentuan:
 - Level tanggung jawab pejabat fungsional tidak dapat dibedakan;
 - Tidak ada fungsi supervisi pada pejabat fungsional di level yang lebih tinggi kepada pejabat fungsional yang lebih rendah.
- Pejabat fungsional yang melakukan cascade kepada pejabat fungsional lainnya, sehingga cascading dapat dilakukan dengan mekanisme kolom c pada gambar di bawah, dengan ketentuan:
 - Level jabatan fungsional dapat disetarakan dengan level jabatan structural tertentu;

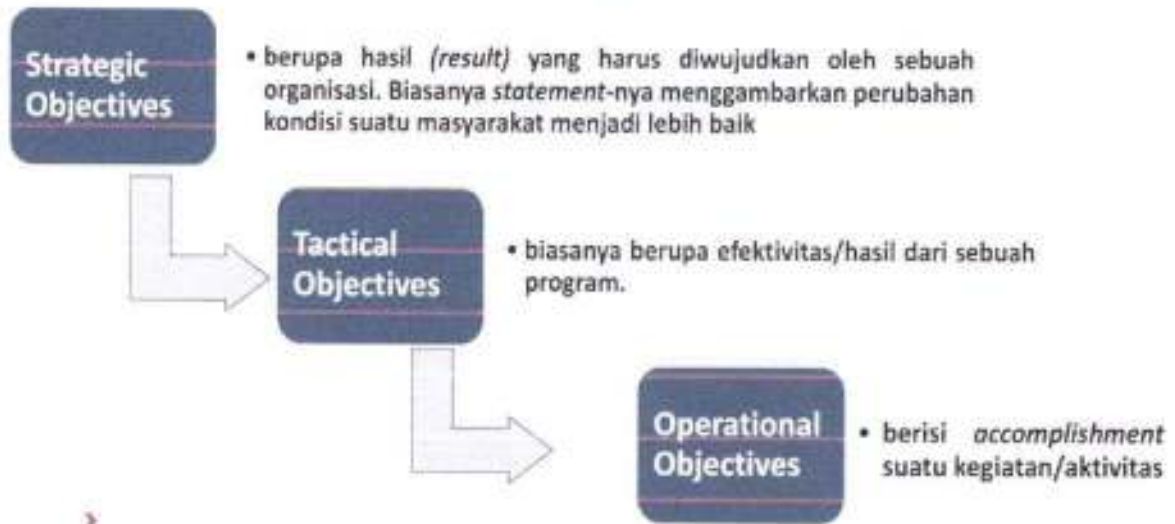
- b. Tiap level jabatan fungsional tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara berjenjang;
- c. Terdapat fungsi supervisi secara berjenjang pada pejabat fungsional di level yang lebih tinggi kepada pejabat fungsional yang lebih rendah

BAB III

TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

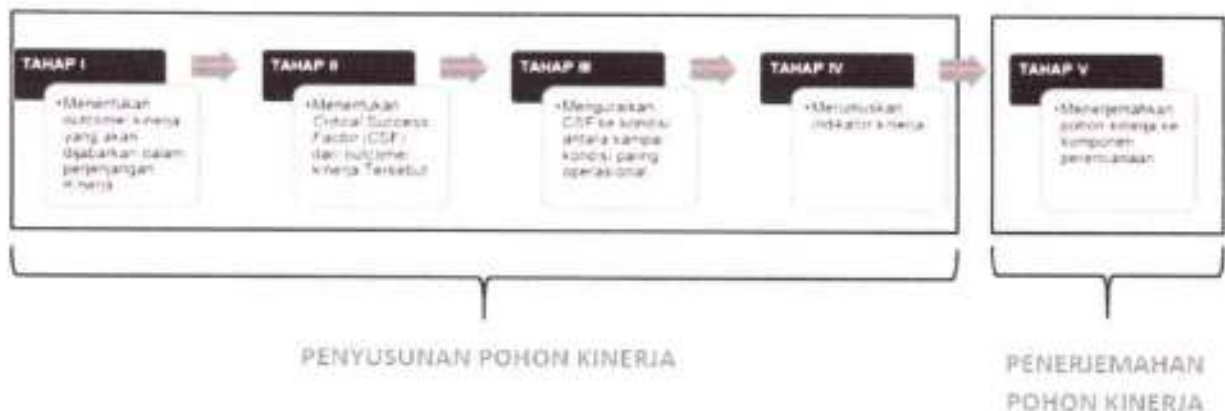
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Hirarki Sasaran dalam Penjenjangan Kinerja tergambar berikut di bawah ini:

A. Hirarki Sasaran Penjenjangan Kinerja



B. Tahapan Penjenjangan Kinerja

Berdasarkan hirarki penjenjangan di atas, maka alur atau tahapan dalam proses penjenjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Penjelasan Penjenjangan Kinerja

Penjelasan gambar:

1. Menentukan Outcome/Kinerja yang akan dijabarkan;
2. Mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) atau faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka *outcome*/hasil berpotensi besar untuk tercapai. Penentuan CSF dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar benar terjadi (*factual problem*);
 - b. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai *outcome*/kinerja di masa yang akan datang (*antisipatif*);
 - c. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;
 - d. Identifikasi CSF harus dilakukan secara *holistic*, tidak tersekat urusan; dan
 - e. Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/*outcome* adalah “akibat” atau “hasil” nya.

Proses penentuan atau pengidentifikasian CSF memiliki 2 (dua) metode, yaitu:

Metode 1: Mencari CSF dengan Mencari Faktor Pembentuk

1. Identifikasi Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian Outcome, dengan menjawab:
 - a. Apa saja yang harus ada/diperlukan agar *outcome*/kinerja tercapai?
 - b. Bagaimana agar kinerja/*outcome* terwujud?
 - c. Apa kondisi/prasyarat yang harus ada agar *outcome* terealisasi?
2. Bisa menggunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencari faktor pembentuk, misal: *Balanced scorecard*, proses bisnis, dll.

Metode 2: Mencari CSF dengan Mengurai Masalah/Penyebab:

1. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu/permasalahan strategis, dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab isu/permasalahan
2. Dianjurkan untuk mendapatkan CSF melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori-teori yang relevan

Contoh CSF: Tingginya Kemacetan (dengan pendekatan masalah/factor Penyebab), contoh tabel:

Faktor Penyebab	Kondisi Yang Diperlukan
Over Kapasitas Jalan	Meningkatnya kapasitas jalan
Pelanggaran oleh pengemudi kendaraan	Menurunnya pelanggaran berlalu lintas
Jalan rusak	Meningkatnya kualitas permukaan jalan
Parkir sembarangan dan tidak sesuai aturan	Berkurangnya parkir liar
Tata kota tidak sesuai peruntukan	Terciptanya penataan kota yang baik

Contoh CSF PADA OUTCOME MENURUNNYA KEMACETAN LALU LINTAS



3. Mengurai Critical Success Factor (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Ke Kondisi Operasional “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud?”

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan	- Kendaraan di jalan raya berkurang - Panjang atau lajur kendaraan di jalan bertambah - Proyek pembangunan jalan/galian dilakukan bukan pada jam sibuk
Menurunnya pelanggaran berlalu lintas	- Pemahaman masyarakat tentang rambu lalu lintas meningkat - Alat dan sarana prasarana memadai dan tersebar di titik rawan pelanggaran - Penegakan aturan pelanggaran lalu lintas berjalan - Dll
Meningkatnya kualitas permukaan jalan	- Terbangunnya jalan-mantab - Dll
Berkurangnya parkir liar	- Sistem perparkiran yang andal - Dll
Terciptanya penataan kota yang baik	- Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas - Terkendalinya pembangunan kota yang sesuai dengan RTRW - Dll

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, maka bentuk Pohon Kinerja yang disusun berdasarkan CSF adalah seperti pada gambar dibawah:



D. Prinsip Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja

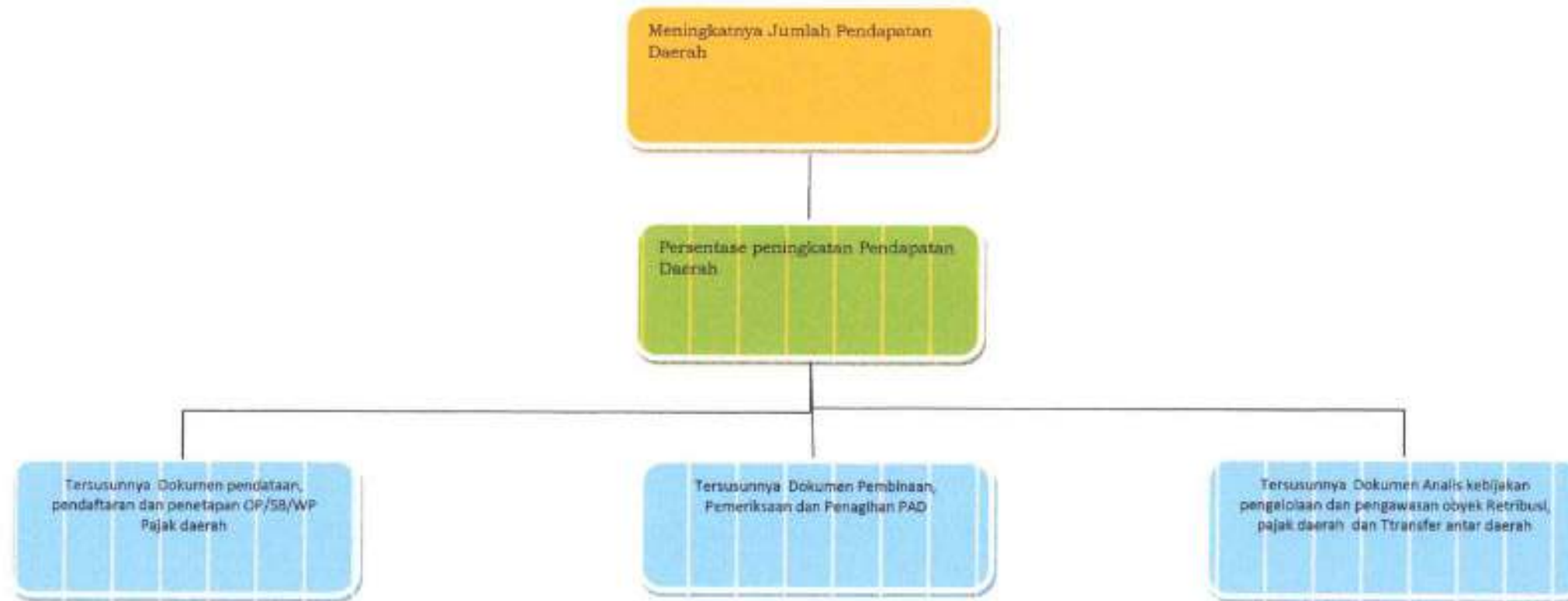
Sejumlah Prinsip-Prinsip Teknis yang harus diperhatikan dalam proses Penyusunan:

- a. Tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan (tidak Dari Awal Sudah Diberi Nama Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah, Program, Sasaran, Program, Kegiatan, dan sasaran kegiatan);
- b. Tidak dihubungkan dulu dengan hierarki organisasi (tidak dari awal sudah diatribusikan untuk jenis/bidang tugas dari instansi pemerintah tertentu, jenjang jabatan tertentu (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan/atau eselon 4);
- c. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting struktur organisasi (tidak dari awal diarahkan kepada unit kerja yang ada);
- d. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting program/kegiatan (tidak dari awal diarahkan kepada program/kegiatan yang ada);
- e. Tidak dihubungkan dulu dengan nomenklatur program/kegiatan (tidak dari awal sudah menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang ditetapkan oleh Sistem/Aplikasi);
- f. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting anggaran (tidak dari awal sudah dicocokkan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA/DPA).

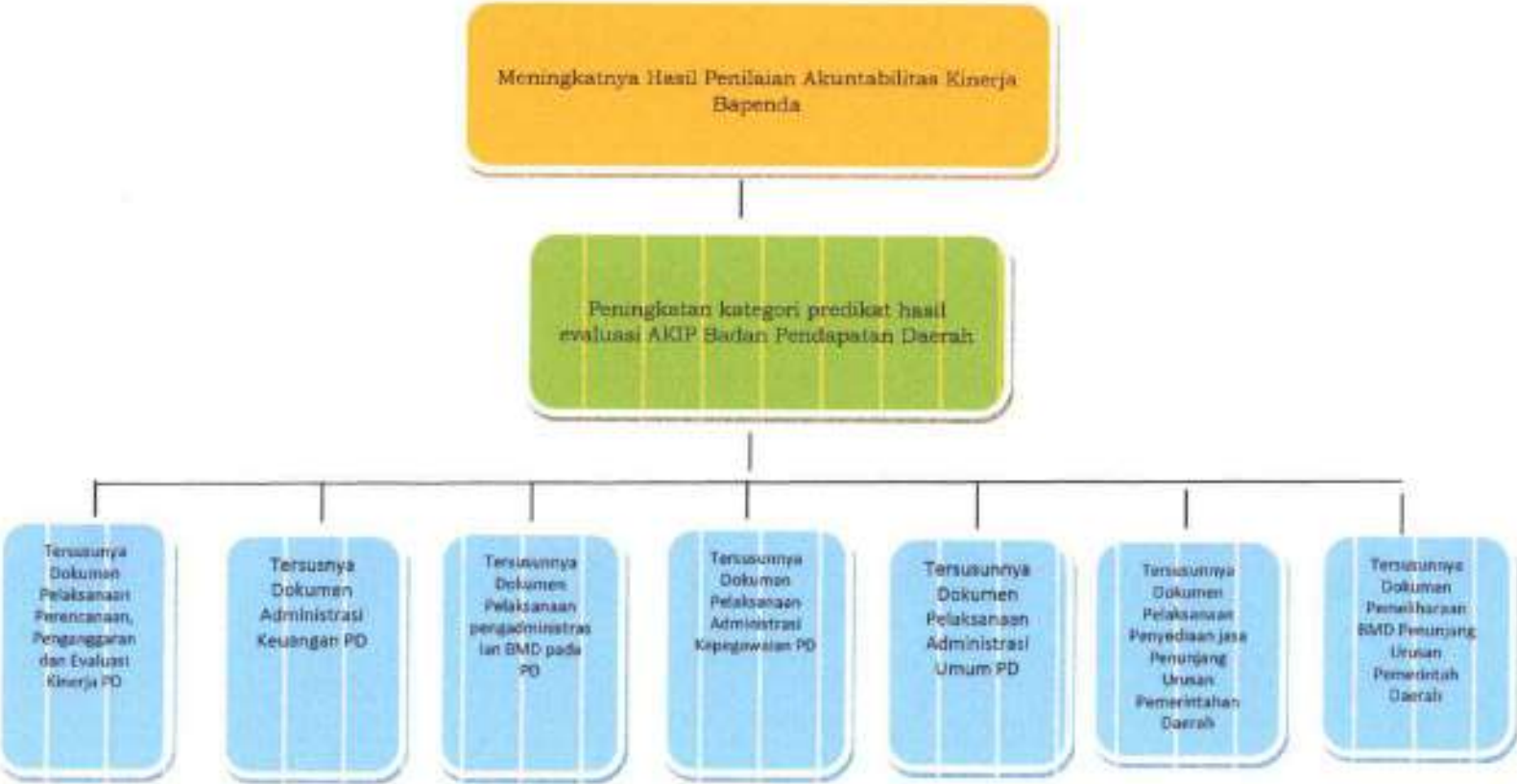
E. Pohon Kinerja

Berdasarkan uraian di atas, maka pohon kinerja pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Pohon Kinerja Sasaran Pertama



2. Pohon Kinerja Sasaran Kedua



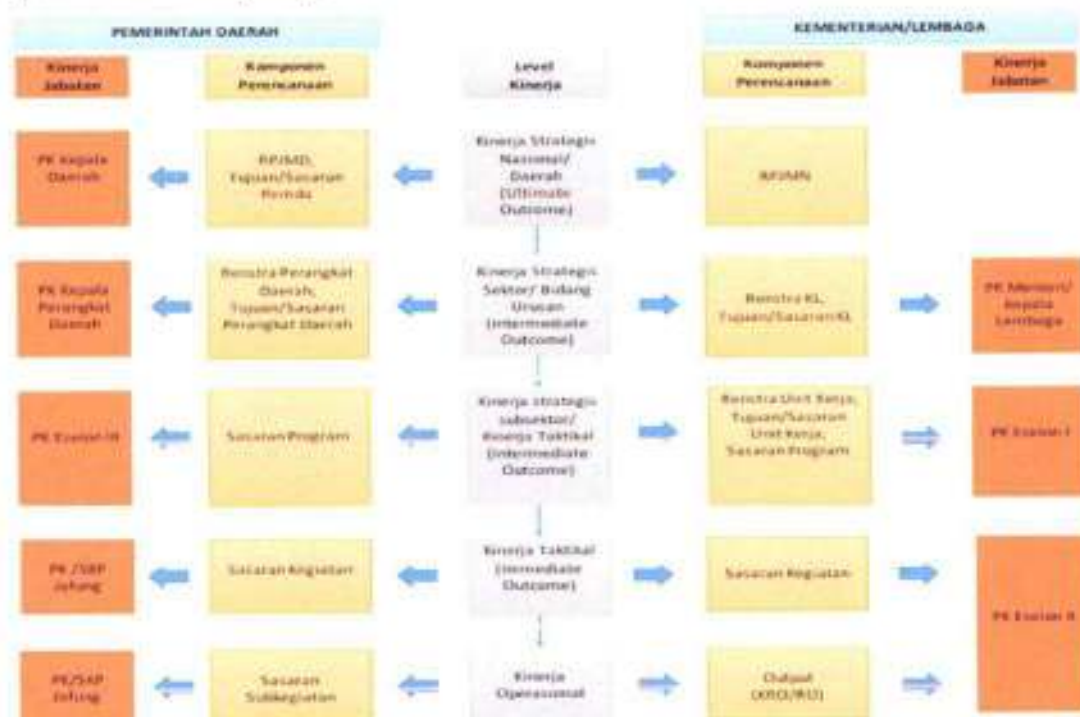
BAB IV

MENUANGKAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

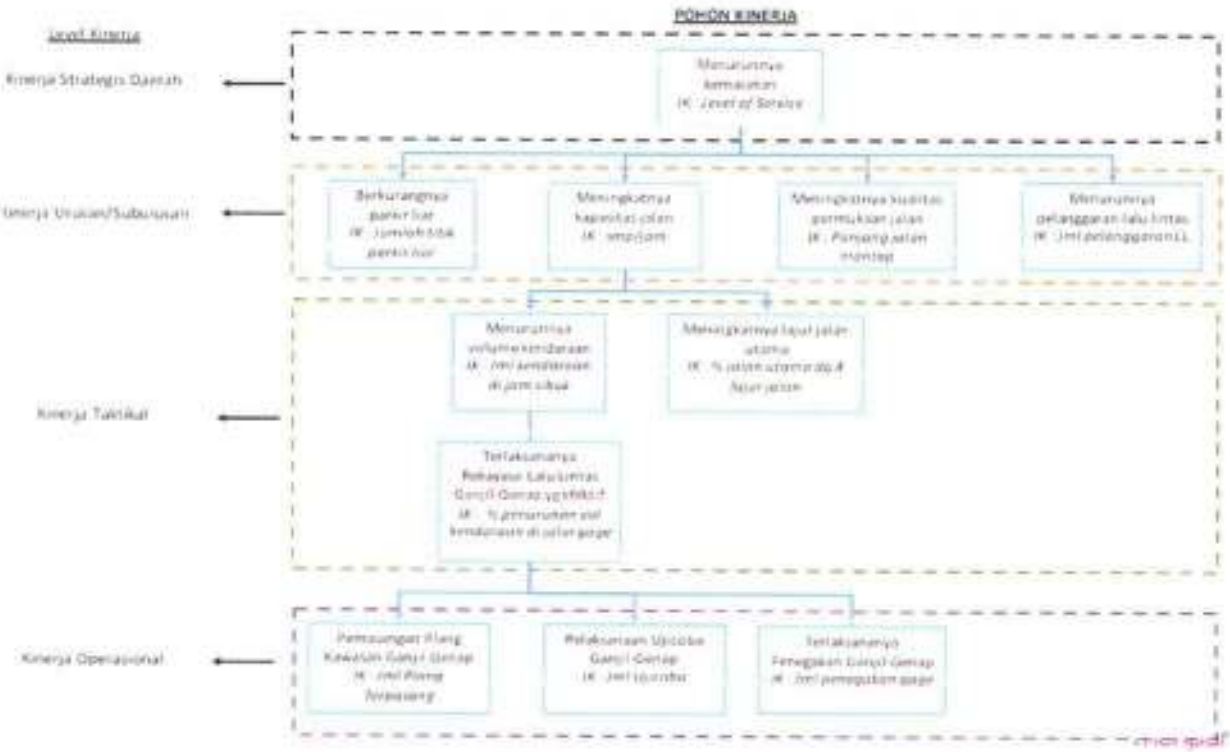
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka tahapan penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan proses yang terdiri atas beberapa Langkah, yaitu:

1. Mengklasifikasi Level Kinerja (Strategis, Taktikal, Operasional)
2. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Jabatan Kementerian/Lembaga
3. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Jabatan Pemerintah Daerah

Tahapan di atas dapat gambarkan dalam skema dibawah ini:



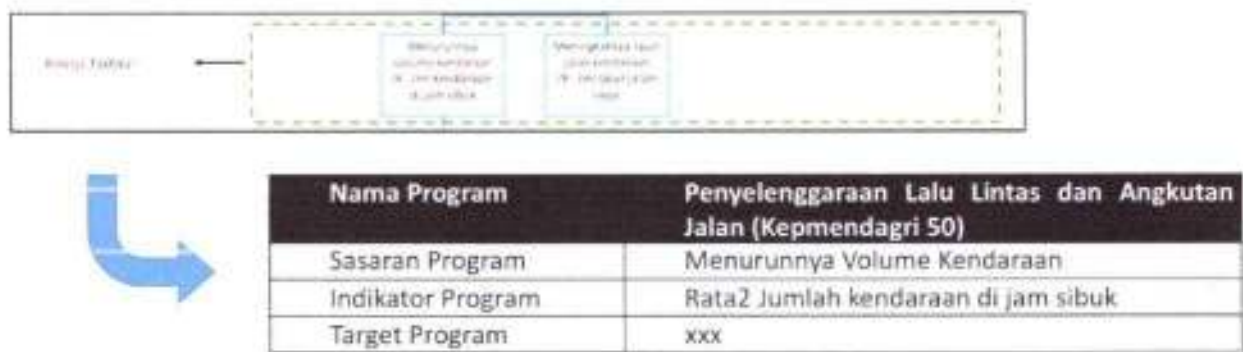
Berdasarkan skema di atas, maka selanjutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap level kinerja pemerintah Daerah, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



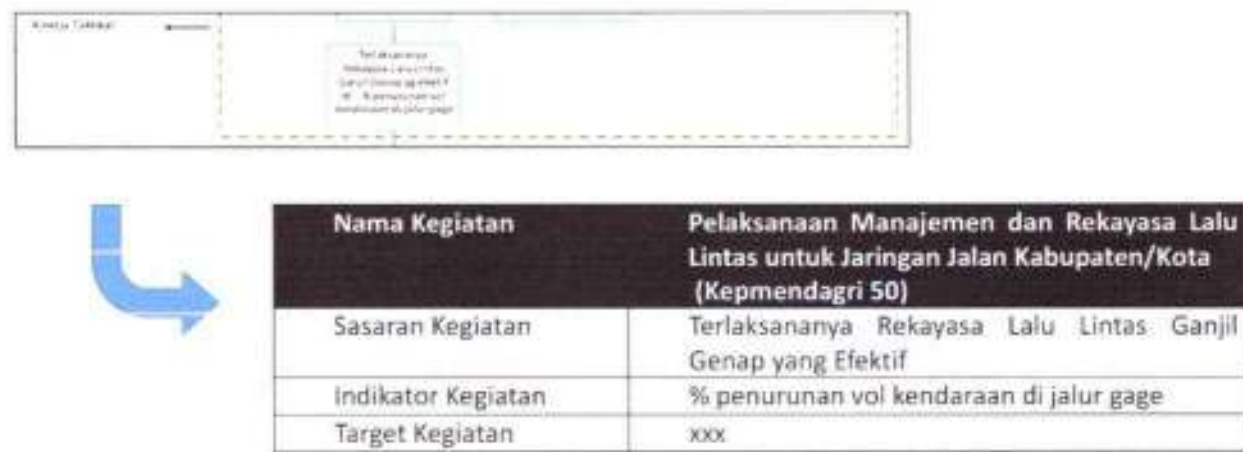
Berdasarkan klasifikasi terhadap level kinerja pemerintah Daerah, maka selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan Dan sasaran dalam perencanaan strategis perangkat daerah dan ukuran kinerja perangkat daerah, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Setelah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis pemerintah daerah dan ukuran kinerja kepala daerah, Langkah selanjutnya adalah menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat administrator, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Setelah menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat admnistratur, tahap berikutnya adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Setelah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional, tahap berikutnya adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran sub kegiatan dan kinerja jabatan fungsional, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Nama SubKegiatan	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Kepmendagri 50)
Sasaran SubKegiatan	Terlaksananya Pemasangan Plang Kawasan Ganjil-Genap (Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)
Indikator SubKegiatan	Jumlah Plang gage Terpasang (Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan)
Target SubKegiatan	Xxx
Anggaran	Rp -

Berdasarkan standar proses di atas, maka penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

A. Klasifikasi Terhadap Level Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa



Tabel 1. Kinerja Strategis dan Kinerja Urusan/ Sub Urusan

		Kinerja Urusan/ Sub Urusan		Kinerja Taktikal		Kinerja Operasional			
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah	1	IK: Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	1	Terlaksannya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	IK: Persentase Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SB/WP Pajak daerah	1	Terasusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SB/WP Pajak daerah	IK: Jumlah pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SB/WP Pajak daerah
						IK: Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	2	Tersusunnya Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	IK: Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD
						IK: Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah	3	Terasusunnya Dokumen Analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer antar daerah	IK: Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengaawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah
2	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	1	IK: Peningkatan kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumbawa	IK: Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	1	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.
							2	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	IK: Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan
							3	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun
							4	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun
							5	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IK:Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun
							6	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK: Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun
							7	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK: Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

Tabel 2. Kinerja Taktikal dan Kinerja Operasional

Kinerja Operasional			Kinerja Sub Operasional		
1	Tersusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SB/WP Pajak daerah	IK: Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SB/WP Pajak daerah	1	tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	IK: Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
			2	tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	IK:Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah
			3	terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	IK: Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
2			4	terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	IK: Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya
			5	tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	IK: Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah
	Tersusunnya Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	IK: Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	1	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	IK:terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
			2	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	IK:tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah
4			3	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	IK:terlaksananya penagihan pajak daerah
5			4	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	IK:terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah
			5	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	IK:terlaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
	Tersusunnya Dokumen Analis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer antar daerah	IK: Jumlah Dokumen analis kebijakan pengelolaan dan pengaawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	1	tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah	IK:Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
			2	tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Dacrah dan kebijakan Pajak daerah	IK:Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah
			3	terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	IK:Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi
			4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	IK:Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
6	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	IK:Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Tersediannya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	IK:Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3	Tersediannya DokumenPerubahan RKA	IK:Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan

				SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4	Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	IK:Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			5	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	IK:Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			6	Tersediannya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	IK:jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD
			7	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	IK:Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	IK: Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	1	tersediannya gaji dan tunjangan ASN	IK:Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			2	tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN	IK:Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
			3	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	IK:Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			4	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	IK:Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
			5	Tersediannya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	IK:Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			6	Tersediannya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	IK:Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
			7	tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	IK:Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
			8	Tersediannya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	IK:Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	1	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	IK:Tersediannya RKBMD SKPD
			2	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	IK:terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	IK: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	1	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi	IK: Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

	Perangkat Daerah	disusun		kepegawaian	
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	1	Tersediannya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	IK:Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			2	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	IK:Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
			3	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IK:Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			4	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	IK:Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK: Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	1	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	IK:Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
			2	tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	IK:Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
			3	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlatan dan perlengkapan kantor	IK:Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
			4	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	IK:Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
8	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK:Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	IK:Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
			2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	IK:Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
			3	terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	IK:Jumlah saranan dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi

B. Penetapan Kinerja Strategis Daerah (sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis dan ukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Nilai RB	80,37%

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target (tahun n)				
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah	1	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	1	Peningkatan kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	BB(79,96)	A(80,36)	A(80,37)	A(80,38)	A(80,39)

C. Penetapan Kinerja Taktikal (sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat administrator)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program (n2)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumbawa	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,37

D. Penetapan Kinerja Operasional (sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional)

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan (n2)
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun..	12 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	3 Dokumen
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumn

		Daerah		
5	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82 Dokumen
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	21 Dokumen
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31 Dokumen
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	6 Dokumen
9		Tersusunnya Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	100%
10		Tersusunnya Dokumen Analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Transfer antar daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	23 Dokumen

E. Penetapan Kinerja Sub Operasional (sebagai sasaran subkegiatan dan kinerja jabatan fungsional)

No	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Targ et Sub Kegi atan (n2)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersediannya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Do k
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersediannya DokumenPerubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Do k
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Do k
5	Koordinasi dan Penyusunan	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil	1

	Dokumen Perubahan DPA SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	3 lap
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 lap
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/ bin
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dok
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dok
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 lap
13	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dok
14	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 lap
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok
16	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya RKBMD SKPD	1 Dok
17	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap
18	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dok
19	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Dok
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 lap
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	36 lap

23	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 lap
24	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4lap
25	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 lap
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 lap
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit
29	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 unit
30	Penyediaan sarana dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit
31	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 lap
32	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 lap
33	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241.353 op
34	Penetapan Wajib Pajak Daerah	tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	9 Dok
35	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 lap
36	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	121 lay
37	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	terlaksananya penagihan pajak daerah	1 Dok
38	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	2 Dok
39	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	terlaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	25 Dok
40	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok
41	Analisa dan Pengembangan Pajak	tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa	5

	Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah	serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Dok
42	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dok
43	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 lap

BAB V

PENUTUP

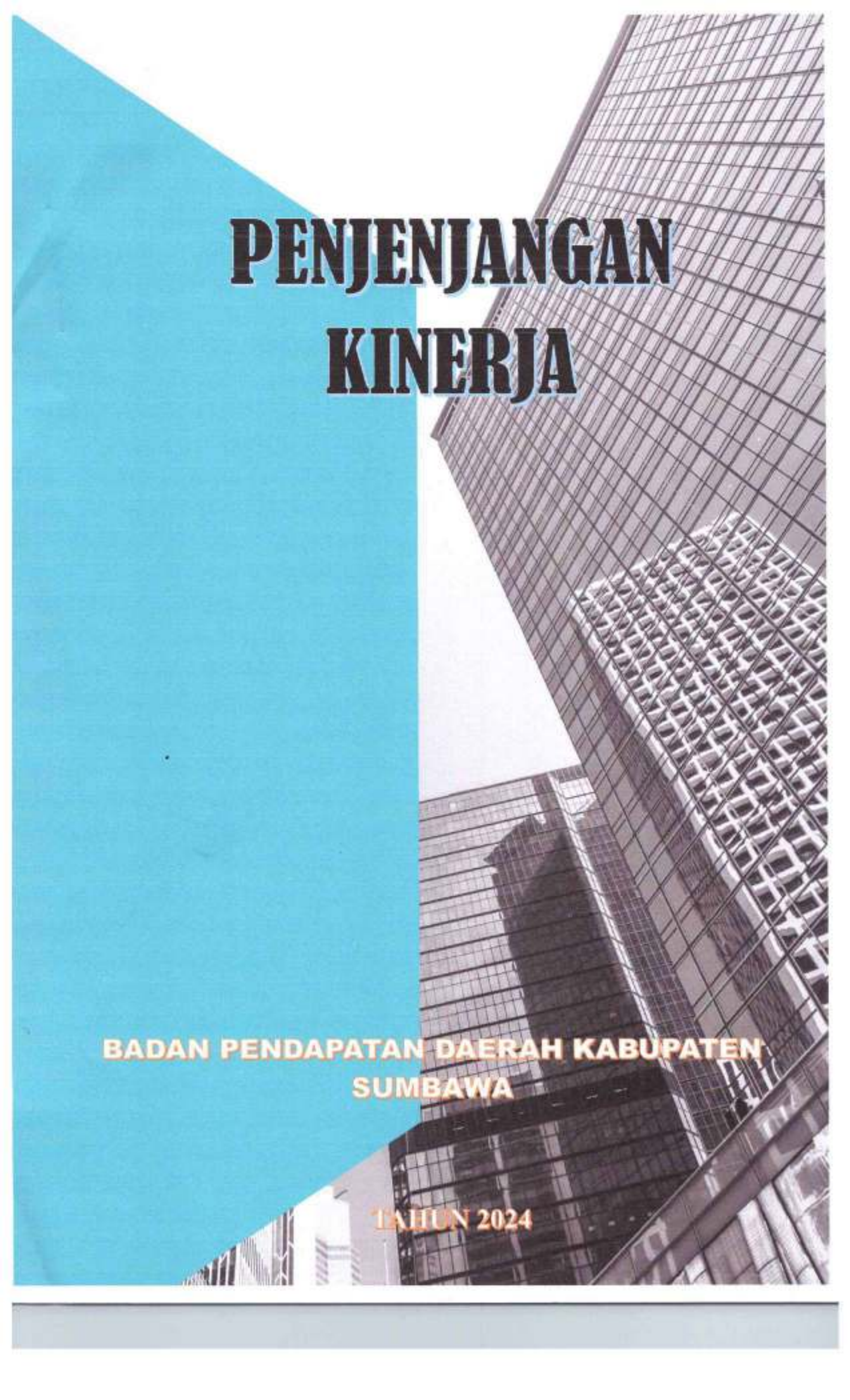
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman atau rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah baru dapat dinyatakan baik dan tepat jika penyelenggara pemerintahan di daerah telah mampu menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator bahwa suatu tugas dan fungsi suatu instansi pemerintahan dapat terselenggara dengan baik adalah tersusunnya Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Penjenjangan kinerja yang disajikan merupakan gambaran system kerja dan hubungan kerja antara level di bawah dengan level di atasnya. Pilihan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 ini akan mempengaruhi kontribusi indikator beserta target. Dalam proses penyusunan Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini telah memperhatikan sejumlah dokumen lainnya seperti Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. Hal tersebut sebagai upaya mengsinkronisasikan seluruh dokumen.

Kami selalu berikhtiar, untuk senantiasa mengoptimalkan seluruh sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, untuk memenuhi seluruh target tiap indikator pada tiap jenjang, sehingga persoalan dan hambatan yang berpotensi dinamis pada Tahun 2023 tetap dapat tertangani. Demikian dokumen penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini kami susun, teriring harapan semoga kami dapat berkinerja baik sehingga seluruh target yang direncanakan dapat tercapai untuk berkontribusi dalam mewujudkan Sumbawa yang gemilang dan berkeadaban. Semoga Allah *Subhaanahuwaata'aala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2023

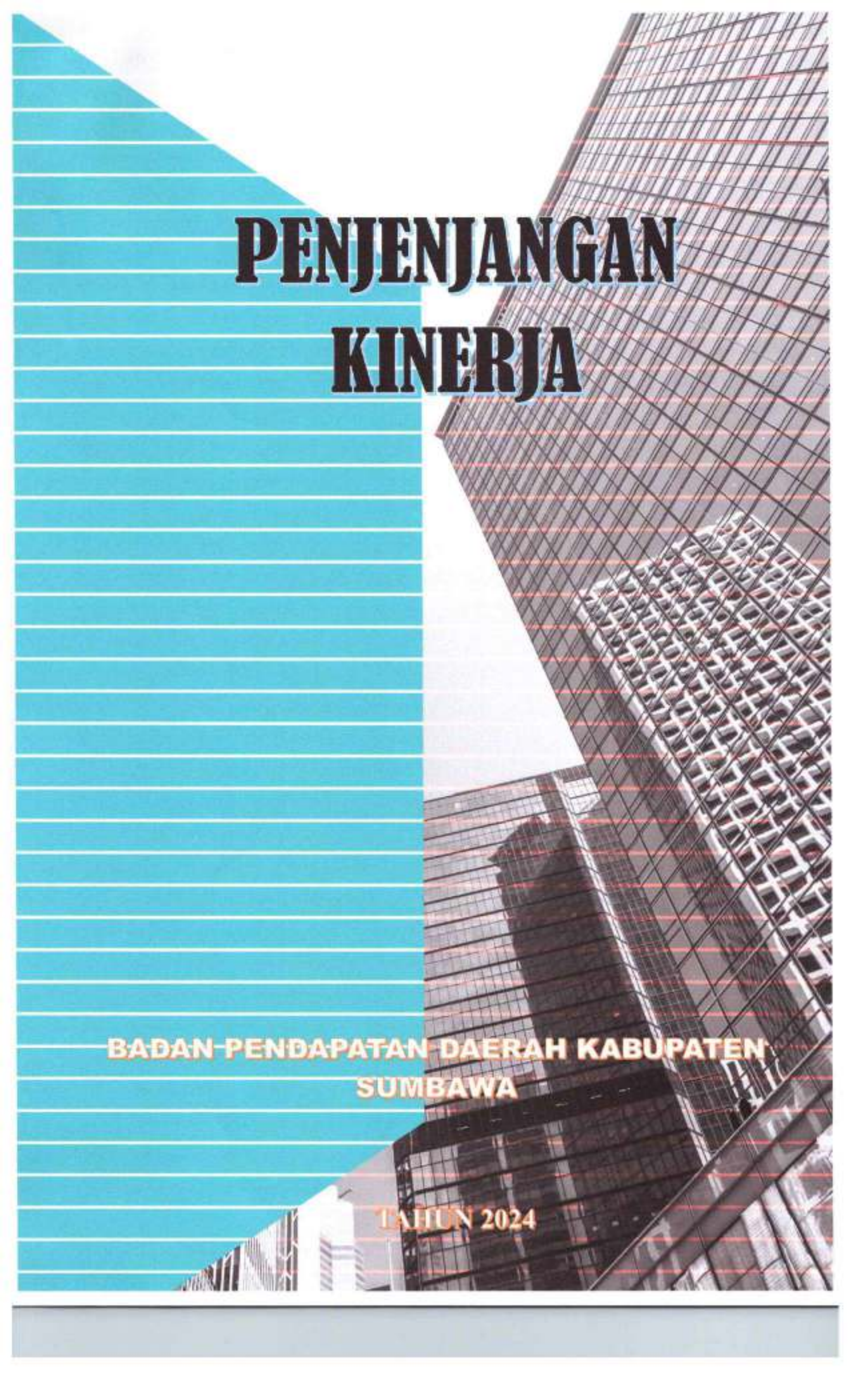

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa,
AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700823 199201 1 001



PENJENJANGAN KINERJA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA**

TAHUN 2024



PENJENJANGAN KINERJA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA**

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Lembar Sampul

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Pohon Kinerja dan Model Logis

Bab III Tahapan Penjenjangan Kinerja

Tahap I: Penentuan Hasil (*outcome*)

Tahap II: Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan/ *Critical Success Factor* (CSF)

Tahap III: Penguraian Kunci Keberhasilan/ *Critical Success Factor* (CSF)

Tahap IV: Perumusan Indikator Kinerja dan Penyusunan Pohon Kinerja

Tahap V: Penerjemahan Pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja
Jabatan

a. Mengklasifikasikan Level Kinerja Perangkat Daerah:

strategic objectives (ultimate outcome);

tactical objectives (intermediate outcome); dan

operational objectives (output/ activity accomplishment)

b. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap
Jabatan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah *subhaanahu wata'aala*, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini dapat tersusun sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen penjenjangan kinerja ini merupakan rangkaian upaya penyelarasan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam sub urusan Pendapatan terutama terkait berkaitan dengan ukuran ketepatan pemenuhan target kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Secara tidak langsung, dokumen ini akan berkaitan erat dengan seluruh dokumen perencanaan di daerah, baik yang tertuang dalam RPJMD, Renstra-PD, RKPD, maupun Renja-PD. Pencapaian sasaran pembangunan melalui capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi suatu bentuk akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa atas penggunaan dana publik sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kewenangan Badan Pendapatan Daerah.

Berbagai rencana dan ekspektasi kinerja dalam dokumen penjenjangan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dapat terwujud sepenuhnya, sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumbawa sebagai ikhtiar dalam mensukseskan pencapaian visi daerah "Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban". Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, hidayah serta perlindungan bagi kita semua.

Sumbawa Besar, 4 Maret 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa,



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700828 199211 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa isu strategis terkait penjenjangan dan penyelarasan kinerja perangkat daerah secara umum, antara lain:

- a. Sebagian Indikator pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak dilaporkan instansi pemerintah terkait;
- b. Program/kegiatan belum dapat mengungkit capaian kinerja instansi pemerintah dan kinerja pembangunan *Collaborative Working* dan pengelolaan kinerja yang bersifat lintas sektor tidak terdesain sejak perencanaan;
- c. Capaian kinerja pembangunan instansi pemerintah relatif stagnan, bahkan turun, namun Nilai Kinerja Individu (SKP) tinggi; dan
- d. Ukuran kinerja tingkat instansi pemerintah dan unit kerja masih ada yang berorientasi pada proses dan *output* saja.

Sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terhadap penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, penjenjangan dan penyelarasan kinerja telah menggunakan metode *Cascading* dan *Alignment* mengadopsi sistem pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. *Cascading* atau Penurunan, yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Sementara itu, Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebelumnya menggunakan metode *alignment* atau penyelarasan yaitu sebuah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan upaya mengefektifkan strategi yang telah ditentukan. Implementasi strategi akan lebih efektif apabila seluruh perangkat daerah melakukan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target dengan strategi organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mendefinisikan Penjenjangan Kinerja sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang

telah direncanakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh ASN pada unit-unit organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi. Tahapan dari Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja; menentukan faktor kunci keberhasilan/ *critical success factor* (CSF); menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; merumuskan Indikator Kinerja; dan menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Dokumen Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan beberapa tujuan, yaitu: untuk mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu Dengan baik; Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu; Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat, Mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dari penjenjangan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah adalah dapat digunakan untuk:

- a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu; penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- b. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat; penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
- c. penataan struktur organisasi.

BAB II

POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS

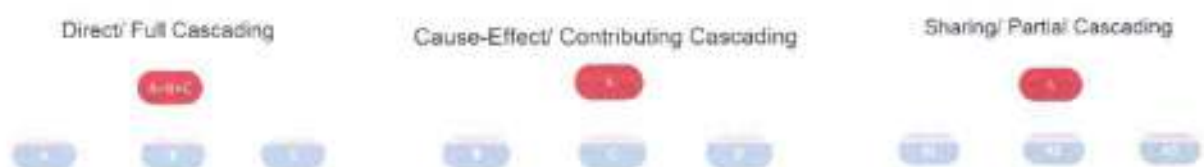
Pohon Kinerja atau *cascading* adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Pada dasarnya, *cascading* sasaran strategis maupun IKU harus dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di suatu organisasi, namun, *cascading* dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. *Cascading* sasaran strategis maupun IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab sehingga sasaran strategis dan IKU tidak selalu di-*cascade* (diturunkan) hingga ke level unit kerja. Penyusunan Pohon Kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

- Logis (hubungan logika sebab akibat/ jika-maka);
- Empiris (berdasarkan kondisi/ isu yang ada);
- Antisipatif (berdasarkan hipotesa karena bukan untuk dipakai secara *short term*);
- Dinamis (mengikuti perubahan lingkungan);
- Wholistic (termasuk *crosscutting* dengan *outcome* antara yang di organisasi lain);
- Out of the box* (untuk mendapatkan yang terbaik dan tidak untuk mempertahankan kondisi eksisting); dan
- Materialisme (penting, bobot tinggi, strategis)

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penyusunan pohon kinerja terdapat hierarki sasaran yang menjadi perhatian atau panduan khususnya dalam menentukan level kinerja, yaitu:

- Objectives* (berupa hasil/ *result* yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi yang biasanya *statement*-nya menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik;
- Tactical Objectives* (biasanya berupa efektivitas/ hasil dari sebuah program); dan
- Operational Objectives* (berisi *accomplishment* atau prestasi atas suatu pencapaian atau penyelesaian suatu kegiatan/ aktivitas).

Terdapat 3 (tiga) model logis sebagai pilihan dalam menjenjangkan kinerja organisasi untuk mendapatkan kinerja yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/ aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi, yaitu: *Direct/ Full Cascading*, *Sharing/ Partial Cascading*, dan *Cause-Effect/ Contributing Cascading*, dengan skema dalam gambar di bawah ini:



Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan pohon kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mengkombinasikan penggunaan ketiga model logis cascading di atas sesuai dengan karakter dari indikator kinerja yang ditentukan.

BAB III TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, penjenjangan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini disusun atas 5 (lima) tahapan, dimana 4 (empat) tahapan awal merupakan bagian dari penyusunan pohon kinerja diikuti dengan bagian akhir yaitu penerjemahan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan. Adapun 5 (lima) tahapan dimaksud adalah:

1. Penentuan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja, berdasarkan isu/permasalahan strategis; struktur, organisasi, tugas dan kedudukan; ekspektasi masyarakat/stakeholder.
2. Penentuan faktor kunci keberhasilan/ *critical success factor* (CSF), yang merupakan area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja organisasi. Apabila CSF tercapai, maka *outcome*/ hasil berpotensi besar untuk tercapai. CSF ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (*factual problem*);
 - b. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai *outcome*/ kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);
 - c. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;
 - d. Identifikasi CSF harus dilakukan secara *holistic*, tidak tersekat urusan;
 - e. Pastikan CSF merupakan "sebab" atau "cara" dan kinerja/ *outcome* adalah "akibat" atau "hasil" nyaTerdapat 2 (dua) metode dalam mencari atau mengidentifikasi CSF atau faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan, yaitu:

Metode 1:

 - a. dengan mencari faktor pembentuk, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian Outcome, dengan menjawab:
 - Apa saja yang harus ada/diperlukan agar *outcome*/kinerja tercapai?
 - Bagaimana agar kinerja/*outcome* terwujud?
 - Apa kondisi/ prasyarat yang harus ada agar *outcome* terealisasi?
 - b. bisa menggunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencari faktor pembentuk, misal: *Balanced scorecard*, proses bisnis, dll.

Metode 2:

Mencari CSF dengan mengurai masalah/ penyebab dengan mengidentifikasi factor-faktor penyebab terjadinya isu/ permasalahan strategis, dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab isu/ permasalahan. Untuk mendapatkan CSF dapat diperoleh melalui diskusi, *brainstorming*, meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori-teori yang relevan.
3. Penguraian CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional
4. Perumusan Indikator Kinerja, dengan prinsip, yaitu:
 - a. tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan (tidak dari awal sudah diberi nama visi, misi, tujuan, sasaran, program, sasaran program, kegiatan, dan/atau sasaran kegiatan)
 - b. tidak dihubungkan dulu dengan hierarki organisasi (tidak dari awal sudah diatribusikan untuk pejabat manajerial)
 - c. tidak dihubungkan dulu dengan eksisting struktur organisasi (tidak dari awal diarahkan kepada unit kerja yang ada)
 - d. tidak dihubungkan dulu dengan eksisting program/kegiatan (tidak dari awal diarahkan kepada program/kegiatan yang ada)
 - e. tidak dihubungkan dulu dengan nomenklatur program/kegiatan (tidak dari awal sudah menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang ditetapkan oleh sistem/aplikasi SIPD); dan
 - f. tidak dihubungkan dulu dengan eksisting anggaran (tidak dari awal sudah dicocokkan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA).

5. Penerjemahan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan

Hasil Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Seluruh uraian proses dan hasil dari Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Tahap I Penentuan Hasil (*outcome*)

Kategori	Uraian Masalah	Sasaran Kinerja (Outcome)
Isu Strategis	Potensi Pendapatan Asli Daerah Rendah	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda
Mandat	Tatakelola Pendapatan Daerah dan pelayanan publik belum maksimal	Meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah dan pelayanan publik yang prima
Harapan Masyarakat atau Stakeholder	Pendapatan Asli daerah meningkat	Meningkatnya jumlah Subjek dan Obyek Pajak Daerah

Tahap II Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan/ *Critical Success Factor (CSF)*

Outcome		Faktor Kunci Keberhasilan/ <i>Critical Success Factor (CSF)</i>	
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah		Pembaharuan database pajak secara real time
			Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Optimalisasi System dan Teknologi Informasi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda		Kualitas layanan pajak dan retribusi Daerah
			Kualitas Sumber Daya Manusia

Tahap III Penguraian Faktor Kunci Keberhasilan/ *Critical Success Factor (CSF)*

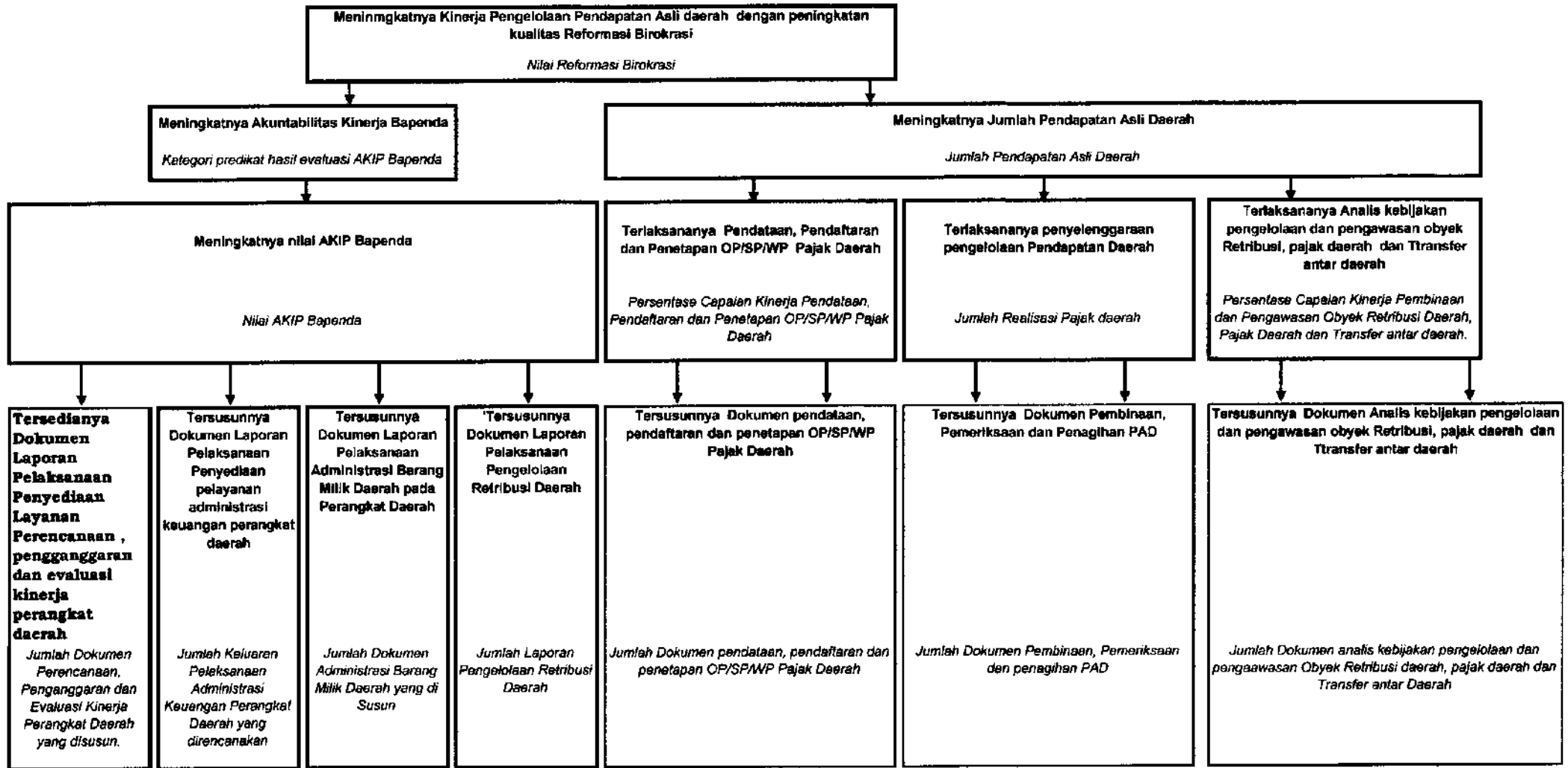
No	Outcome	Kunci Keberhasilan/ <i>Critical Success Factor (CSF)</i>		Kondisi yang diperlukan
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah		Pembaharuan database pajak secara real time	Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi
			Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Pemetaan terhadap potensi pendapatan Pajak Daerah dan retribusi daerah
			Optimalisasi System dan Teknologi Informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Refocusing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sektor penyumbang PAD	Koordinasi dengan stakeholder terkait
			Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif	Validasi data potensi Penerimaan Pendapatan Asli daerah

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kualitas layanan pajak dan retribusi Daerah	Pengendalian dan pembinaan wajib pajak
		Kualitas Sumber Daya Manusia	Bimbingan teknis kompetensi layanan perpajakan

Tahap IV Perumusan Indikator Kinerja

No	Outcome	Kunci Keberhasilan/ Critical Success Factor (CSF)	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah		
		Pembaharuan database pajak secara real time	Jumlah Objek pajak yang sesuai dengan NJOPnya
		Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah
		Optimalisasi System dan Teknologi Informasi	Laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
		Refocusing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sektor penyumbang PAD	Hasil analisa, pengembangan dan kebijakan pajak daerah
		Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif	Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda		
		Kualitas layanan pajak dan retribusi Daerah	Penerapan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan
		Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
			Informasi tentang pelayanan mudah di akses melalui berbagai media

Berdasarkan uraian 4 (empat) tahapan di atas, maka berikut disajikan pohon kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa:



Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang disusun</i>	<i>Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun</i>	<i>Jumlah DOKumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun</i>	<i>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>

Tahap V Penerjemahan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan

a. Mengklasifikasikan Level Kinerja *Strategic objectives (ultimate outcome)*

Kinerja Strategis PD (Ultimate Outcome)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Tactical objectives (intermediate outcome)

Kinerja Taktikal (Intermediate Outcome)	Kinerja Taktikal (Immediate Outcome)
Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah
Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD
Terlaksananya Analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer antar daerah	Tersusunnya Dokumen Analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer antar daerah
Meningkatnya nilai AKIP Bapenda	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	<i>Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
--	---

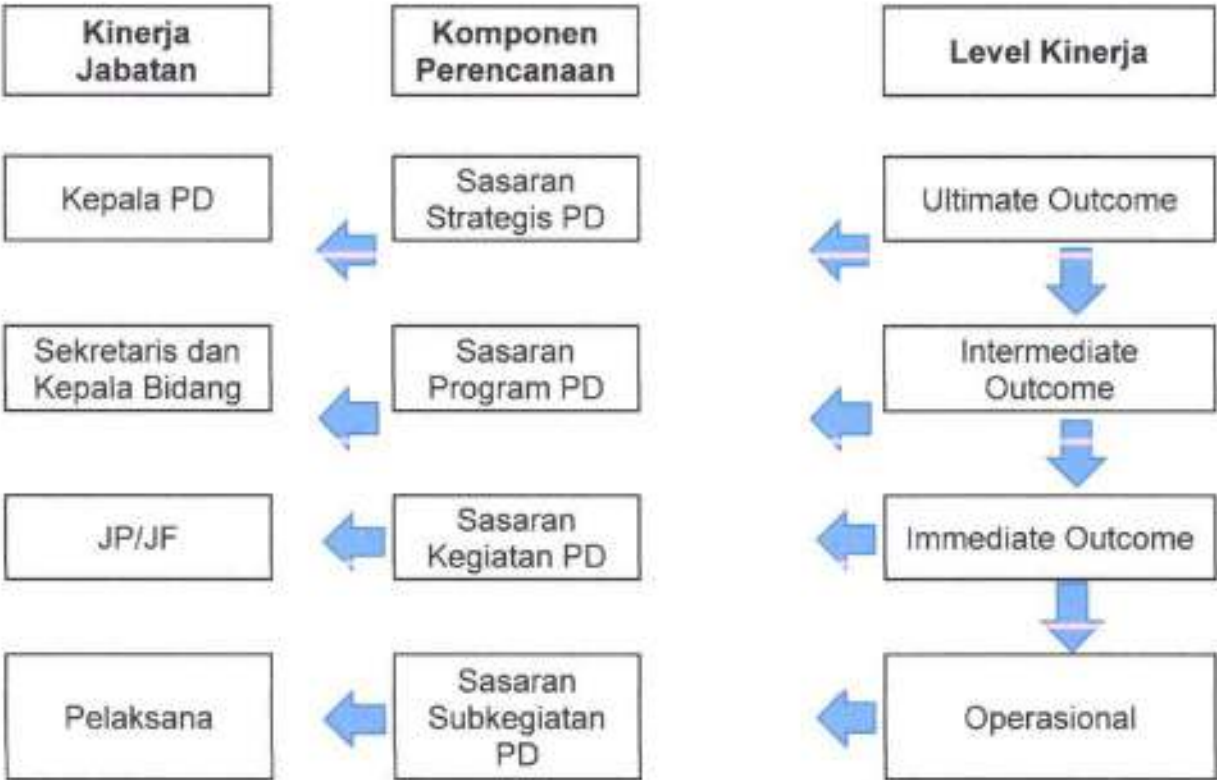
Operational objectives (output/ activity accomplishment)

Kinerja Operasional	Kinerja Operasional
tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah
terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	terlaksananya penagihan pajak daerah
terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah
tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	terlaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah

Kinerja Operasional	Kinerja Operasional
tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Tersediannya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD
	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
	tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan
	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Tersediannya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

b. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, dilakukan dengan skema sebagai berikut:



BAB IV PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman atau rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah Badan Pendapatan Daerah dapat dinyatakan baik dan tepat jika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, baik dari sisi cakupan maupun mutu layanan untuk berkontribusi menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif serta efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menyusun dokumen penjenjangan kinerja ini sebagai salah satu kewajiban sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjenjangan kinerja ini merupakan gambaran system dan hubungan kerja antar tiap unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Pilihan nomenklatur tujuan, sasaran, program serta kegiatan dan subkegiatan direncanakan untuk berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Perjanjian kinerja seluruh ASN di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, 4 Maret 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumbawa,



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700823 199211 1 001